

BAB I

PENDAHULUAN

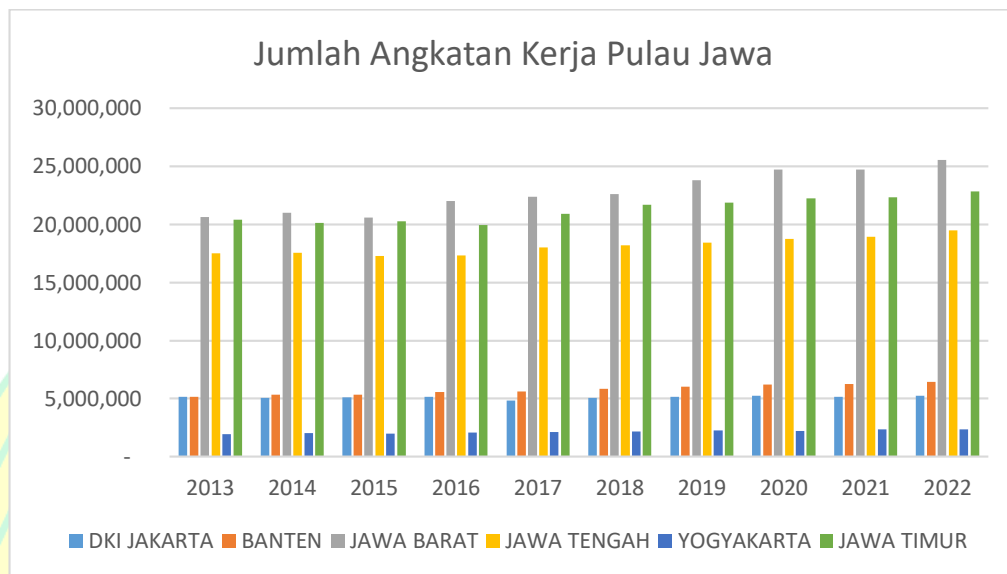
1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan terpenting pembangunan ekonomi salah satunya yaitu tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu mencukupi untuk mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi dari perkiraan. Jadi, jika ada ketidakseimbangan antara usia kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, tingkat pengangguran yang tinggi dan akan menyebabkan tidak stabilnya perekonomian selain itu akan menyebabkan ketidakstabilan dan perubahan di bidang lainnya. Salah satu masalah penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran yang tinggi, terutama pada Indonesia. Pangastuti (2021) mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan pada lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang ada, sedikitnya kemampuan dalam menciptakan hal baru, dan makin majunya teknologi yang cepat.

Dengan populasi yang lebih banyak di Indonesia, pulau Jawa memiliki berbagai macam permasalahan pada tenaga kerja. Meskipun dalam proporsi yang berbeda, kondisi pasar tenaga kerja di Pulau Jawa hampir identik dengan kondisi di Indonesia. Pulau Jawa masih memiliki pekerja terbanyak di Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. FR Wasila Putri (2016) mengatakan bahwa ada beberapa solusi untuk meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja ada beberapa komponen yang mempengaruhi, diantaranya investasi, ekspor, dan upah minimum. Kebijakan upah minimum adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Di satu sisi, populasi yang lebih besar merupakan SDM yang mampu diandalkan, namun dapat menjadi permasalahan yang ada konsekuensi yang signifikan bagi sektor ekonomi. Tingkat pengangguran secara fluktuasi cenderung relatif tinggi apabila tingkat pertumbuhan jumlah angkatan kerja lebih besar daripada tersedianya jumlah lapangan kerja baru (Ibid).

Gambar 1.1 Jumlah Angkatan Kerja Pulau Jawa 2018-2022

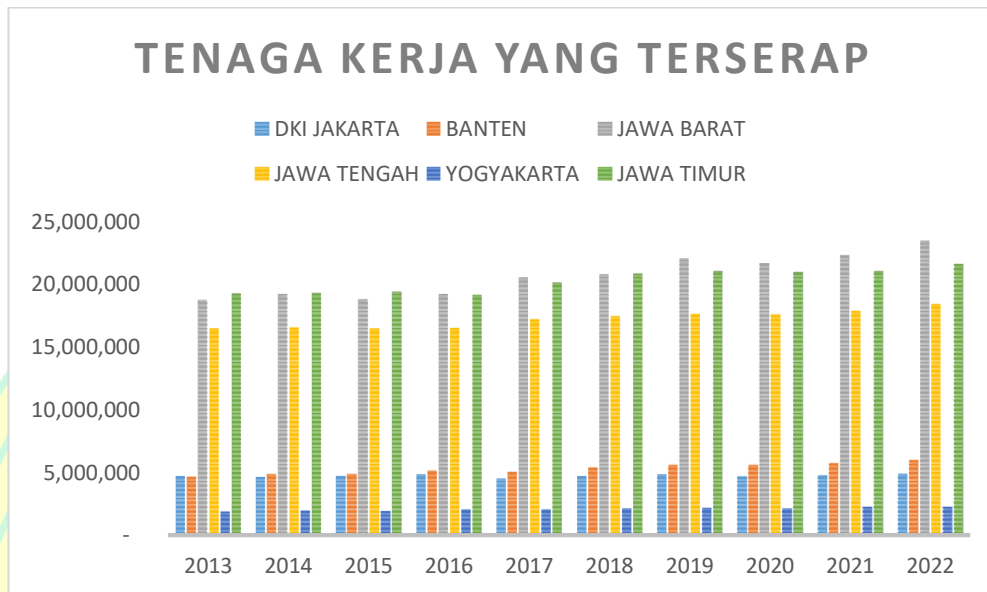


Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2022

Dapat dilihat pada gambar 1.1 diatas Provinsi di Pulau Jawa mempunyai angkatan kerja tertinggi yaitu pada Provinsi Jawa Barat. Jumlah angkatan kerja tertinggi di tahun 2022 yaitu sebanyak 25.578.174 orang. Berbeda halnya pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan jumlah angkatan kerja paling sedikit dibanding dengan provinsi lainnya pada pulau Jawa, bahkan tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Yogyakarta berjumlah 2.336.076 jiwa. Dari keadaannya, populasi di pulau Jawa mampu mencapai jumlah pertumbuhan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan populasi pulau lainnya yang ada di Indonesia.

Michael P Todaro (2000) menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat banyak peluang kerja yang tersedia untuk dipenuhi oleh para pencari kerja. Sudarsono menyebut jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu industri sebagai permintaan tenaga kerja. Sedangkan Roni A (2010) mengartikan bahwa ada tiga komponen yang mempengaruhi terserapnya tenaga kerja: tingkat upah, nilai produksi, dan investasi. Jika salah satu dari komponen ini berubah, itu akan menyebabkan adanya tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan.

Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Pulau Jawa 2013-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2022

Dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di Pulau Jawa masih terbilang cukup rendah karena belum bisa menutupi tingginya angka angkatan kerja disetiap tahunnya terus meningkat. Pada data gambar 1.2. disimpulkan pada data ini provinsi yang memiliki jumlah paling banyak tenaga kerja yang terserap ada pada provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2022 ada 23.452.568 juta jiwa karena Jawa Barat sendiri memiliki wilayah yang cukup luas lalu Jawa Barat sendiri memiliki pusat industry terluas yaitu pada daerah Bekasi, Cikarang dan Karawang, dimana pada pusat industry ini menyebabkan Jawa Barat banyak mempunyai peluang yang besar bagi angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu tenaga kerja terserap (orang yang sudah bekerja) paling sedikit ada di provinsi Yogyakarta, pada tahun 2022 Yogyakarta hanya memiliki 2.241.131 juta jiwa. Dikarenakan Yogyakarta memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya maka dari itu pertumbuhan penduduk dan pusat industry di wilayah Yogyakarta masih terbilang cukup sedikit jika dibanding provinsi lain yang ada pada Pulau Jawa.

Karena tingginya tingkat angkatan kerja, orang yang bekerja atau tenaga kerja yang terserap di pulau Jawa masih dianggap cukup rendah. Salah satu cara pemerintah menangani masalah ketenagakerjaan adalah dengan menerapkan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan tingkat upah yang diterima masyarakat. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menaikkan jumlah upah per kapita yang menyebabkan jumlah upah rata-rata tenaga kerja juga ikut naik.

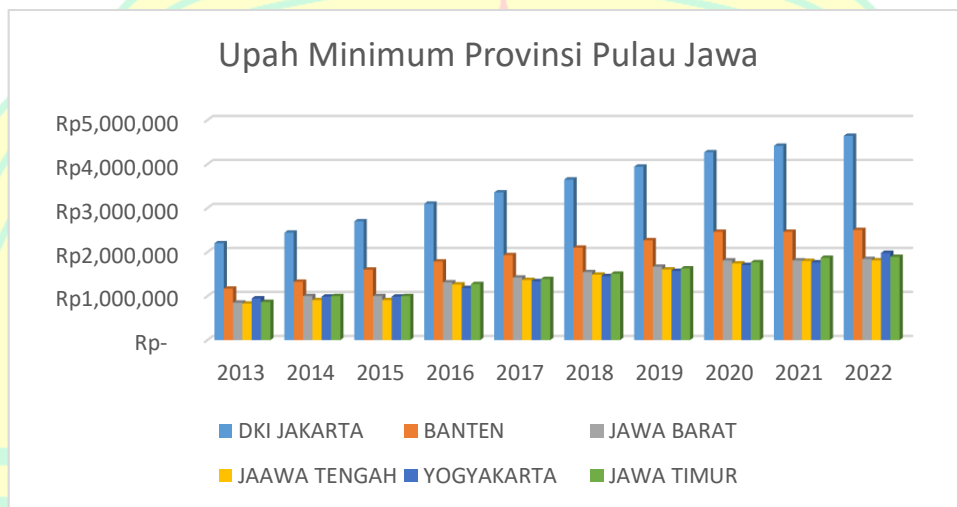
Menurut Murtadho Ridwan (2013), mendefinisikan upah yaitu total uang yang diterima pekerja selama periode waktu tertentu sebagai hasil dari usaha dan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa menentukan permintaan akan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kemampuan untuk menciptakan barang & jasa. Simanjuntak menyatakan bahwa secara umum, kuantitas serta tingkat produksi mempengaruhi permintaan jumlah tenaga kerja. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin banyak pula pendapatan (Danang P, 2011). Upah, jumlah produk yang terjual, dan tingkat suku bunga memengaruhi penyerapan tenaga kerja, menurut Feriyanto (2014).

Upah, menurut Atifatur (2018), adalah kompensasi atas pekerjaan seseorang untuk perusahaan. Jika jumlah permintaan barang dan jasa naik, maka produksi juga naik, lalu gilirannya menghasilkan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Karena naiknya tingkat upah diharapkan akan menyebabkan naiknya angka kesempatan angkatan kerja untuk bekerja melalui naiknya jumlah konsumsi. Lain hal nya penelitian oleh Betty Silfia Ayu Utami (2020) menemukan bahwa naiknya jumlah upah tentunya dapat berdampak buruk pada penyerapan tenaga kerja.

Kuncoro (2000) menyatakan bahwa setiap naiknya jumlah upah akan berdampak pada penurunan jumlah permintaan tenaga kerjanya. Ini karena, apabila jumlah upah naik sedangkan harga lain menetap, maka harga tenaga kerja lebih tinggi harganya daripada harga lainnya, dalam hal ini akan memaksa sektor bisnis untuk mengurangi tenaga kerja yang mahal dan menggantinya dengan harga yang tinggi untuk keuntungan mereka. Karena kenaikan jumlah upah, pengusaha juga

mampu memaksa untuk menaikkan harga produk ciptaan mereka, lalu maka dari itu konsumen akan merendahkan jumlah konsumsinya. Akibatnya, hasil produk yang belum terjual akan menyebabkan pihak produsen mengurangi jumlah produksi, yang akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang diperlukan.

Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP) Pulau Jawa 2013-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik 2013-2022

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat Upah Minimum tertinggi periode tahun 2013 sampai tahun 2022 terdapat pada provinsi Jakarta, dimana jumlah UMP paling tinggi tahun 2022 yang berjumlah Rp. 4.641.854. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Namun berdasarkan data tersebut Upah Minimum Pulau Jawa terus meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik UMP yang paling rendah yaitu provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dimana UMP tertinggi disana masih berjumlah Rp. 1.813.011 hal ini disebabkan kebutuhan dan biaya hidup di provinsi Jawa Tengah masih terbilang cukup rendah maka dari itu UMP disana juga masih kecil.

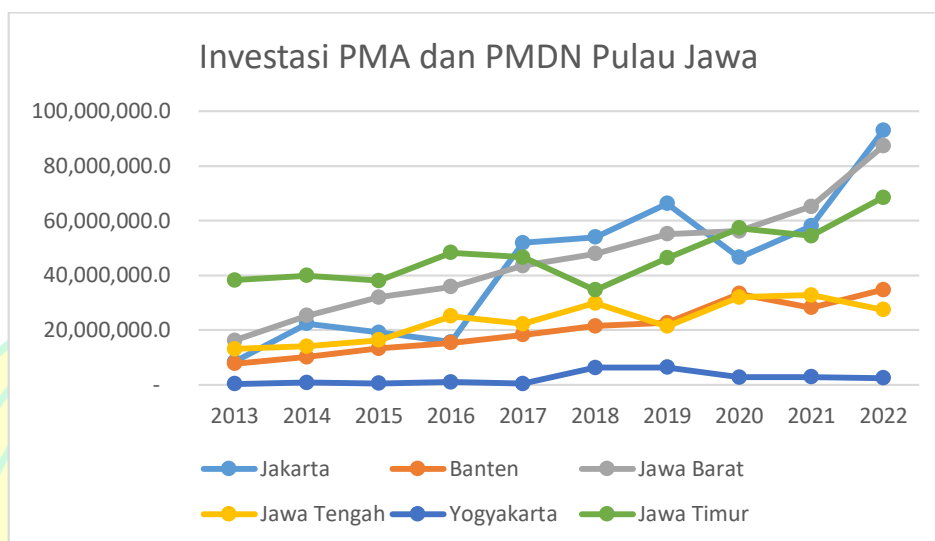
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menimbulkan pertanyaan apakah akan berdampak pada peningkatan daya beli, jumlah tenaga kerja, hubungannya dengan pasar tenaga kerja yang mengharapkan output, dan lain-lain karena perusahaan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kenaikan upah minimum. untuk

seluruh angkatan kerja. Hanya dunia usaha yang harus memutuskan *trade-off* yang akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi dunia usaha atau pelaku usaha dan akibatnya terjadi PHK.

Selain kebijakan kenaikan upah, pemerintah juga harus memperhatikan beberapa hal lain dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Investasi akan menaikkan jumlah hasil produksi, yang secara tidak langsung akan menaikkan jumlah hasil produksi, yang akan menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja yang diperlukan. FR Wasilaputri (2016) mengatakan, Meningkatkan investasi pada mesin adalah salah satu cara untuk mengatasi tingkat pengangguran dikarenakan mesin membutuhkan operator, sehingga menyerap tenaga kerja dan menghasilkan lapangan kerja yang baru. Pendapatan dan konsumsi harus seimbang. karena lebih banyak konsumsi akan menaikkan output yang dibutuhkan dan akan banyak upah yang dihasilkan yang menaikkan daya beli masyarakat.

Seperti yang dinyatakan oleh Sukirno (2010), peningkatan permintaan agregat dan pendapatan nasional akan diiringi peningkatan kesempatan kerja. Susanti beranggapan bahwa dana anggaran yang dialokasikan untuk membantu harus diutamakan pada beberapa sektor yang mampu menciptakan dampak pada aktivitas ekonomi secara meluas & intensif. Ini akan menyebabkan pertumbuhan sektor industri, dampaknya, akan tercipta lapangan kerja tambahan.. Ekspor berarti menjual barang yang dimiliki suatu negara dengan negara lain untuk harapan mendapatkan pendapatan dalam mata uang negara lain. Mengatasi masalah ekonomi, khususnya meningkatkan jumlah pendapatan serta menciptakan lebih banyak jumlah kesempatan kerja, merupakan tujuan perdagangan internasional (Djojohadikusumo dalam Boediono, 2005).

Gambar 1.4 Investasi Pulau Jawa 2018-2022



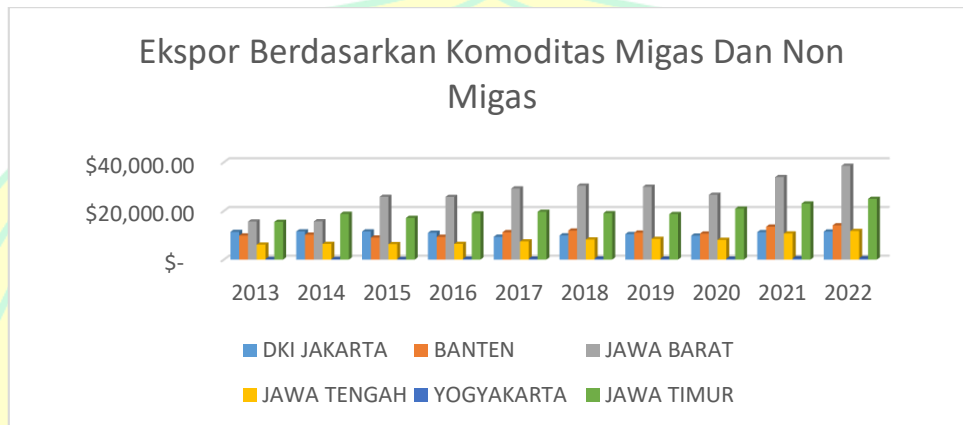
Sumber : Kementerian Investasi / BKPM 2013-2022

Meningkatnya investasi di pulau jawa maka akan meningkatnya pula kesempatan kerja. Pada gambar 1.4 menunjukkan nilai investasi PMA dan PMDN di pulau jawa terus bertambah pada tahun 2013-2022. Investasi terbesar di miliki oleh provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 92.967.658,8 juta dan nilai investasi terendah di pegang oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 2.388.892,3 pada tahun 2022.

Selanjutnya ada ekspor yang Selain upah, ada banyak hal lain yang menjadi salah satu perhatian oleh pemerintah dalam mengupayakan dalam menangani problem di ketenagakerja. Perekonomian Indonesia khususnya pulau Jawa sangat didukung oleh perdagangan internasional. Nilai ekspor dan impor tahunan dapat digunakan untuk menghitung aktivitas ini. Kegiatan ekspor menghasilkan devisa, dan impor menghasilkan bahan baku produksi sebagai komponen produksi atau kebutuhan pembangunan lainnya. Kegiatan ekspor didefinisikan Yerimias (2011), sebagai system suatu perdagangan di mana produk dikirim keluar dari suatu wilayah tersebut dengan mematuhi peraturan. Ekspor mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah negara di era globalisasi saat ini, ketika integrasi antar negara semakin kuat. Menurut Fouad (2005), ekspor barang

dan jasa menurunkan desakan pada neraca pembayaran, mendorong pertumbuhan pekonomian, dan memberikan kesempatan bekerja. Ini adalah salah satu sumber utama pendapatan devisa.

Gambar 1.5 Nilai Ekspor



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2022

Dilihat data di gambar 1.5 keadaan jumlah ekspor terjadi naik dan turun pada tahun 2013 sampai 2022. Pada data diatas disimpulkan bahwa jumlah nilai ekspor migas dan non migas tertinggi ada pada provinsi Jawa Timur dimana Tembaga, limbah dan sisa logam mulia lainnya, kayu, paduan besi, feronikel, undang raksasa yang tidak dikemas secara kedap udara, dan undang merupakan beberapa barang ekspor utama Jawa Timur. Lalu nilai ekspor terendah ada pada provinsi Yogyakarta, dimana ekspor pada provinsi Jawa Timur dihasilkan dari Industri kerajinan dan hasil pertanian.

Untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penulis memakai judul "Pengaruh Upah Minimum, Investasi PMDN dan PMA, dan Ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa" menjadi minat penulis.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan ada beberapa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh nilai Investasi terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh korelasi nilai Ekspor terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi serta Nilai Ekspor terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa tahun 2013-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, adapun beberapa tujuu dalam penulisan ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai Investasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana nilai Ekspor berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2022.
4. Untuk menganalisis bagaimana Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Nilai Ekspor terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa tahun 2013-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pembaca lebih banyak wawasan dan informasi tentang pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Ekspor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan dan rekomendasi bagi yang membuat kebijakan, seperti pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, khususnya pemerintah di tingkat nasional, untuk mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pembaca

Penelitian ini mampu membantu agar mengetahui tentang hal-hal yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa melalui peningkatan Upah Minimum Provinsi, Nilai Investasi, dan Ekspor

b) Bagi peneliti

Penelitian ini akan memberi mereka lebih banyak pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi PMDN dan PMA, serta Ekspor Migas dan Non Migas terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini membantu mengambil suatu kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa sebagai upaya untuk mengurangi masalah pengangguran di Indonesia.

1.6 Kebaruan Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya sudah mengkaji mengenai topik penelitian penyerapan tenaga kerja, namun terdapat kebaruan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rini Sulistiawati, Danang Pratomo, Jafri, A.Rian Patriansyah, Febryana Rizki Wasilaputri, Citra Rosalina Fikri, Betty Silfia Ayu Utami, Alfizah Annisaul M, dkk, Devi Rizky Vitalia dan Latri Wihastuti, Henny Rahmatullah) yang menggunakan variabel penelitian yang berhubungan dengan Penyerapan Tenaga Kerja melalui Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Ekspor. Penelitian terdahulu sebelumnya juga menggunakan objek penelitian dari berbagai provinsi dan daerah dengan mengambil data dari 5 tahun. Dalam penelitian ini, variabel tambahan yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja digunakan dengan menggunakan variabel Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Ekspor. Penelitian ini dilakukan di pulau Jawa, dengan enam provinsi: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini diakses melalui situs web Badan Pusat Statistik selama 10 tahun. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena indikator variabelnya hanya menggunakan satu atau dua variabel dan satu daerah saja. Namun, penelitian ini menggunakan pulau Jawa sebagai sampel dan mengumpulkan data terbaru dari tahun 2013 hingga 2022.